

SKRIPSI
PENGATURAN LARANGAN RESTRIKSI KUANTITATIF DALAM
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) TERKAIT
SENGKETA NIKEL ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA DI
WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) TAHUN 2020

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RIHAN ALFARINO

1510112045

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNATIONAL (PK VI)



Pembimbing :

Dr. Delfianti, S.H., M.H

Dewi Enggriyeni, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

**PENGATURAN LARANGAN RESTRIKSI KUANTITATIF DALAM
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) TERKAIT
SENGKETA NIKEL ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA DI
WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) TAHUN 2020**

**(Rihan Alfarino, 1510112045, Program Kekhususan Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Andalas)**

ABSTRAK

Indonesia mempercepat larangan ekspor nikel yang sebelumnya larangan tersebut diberlakukan pada tahun 2022 dan dipercepat pada tahun 2020, Uni Eropa merasa dirugikan atas kebijakan Pemerintah Indonesia, dan akhirnya Indonesia digugat ke dalam WTO dengan Nomor aduan DS592. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan : (1) Pengaturan larangan restriksi kuantitatif dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) terkait sengketa nikel antara Indonesia dan Uni Eropa Tahun 2020, (2) tantangan dan upaya Pemerintah Indonesia menghadapi sengketa nikel dengan Uni Eropa Tahun 2020. Metode penulisan hukum yang penulis gunakan bersifat normatif, dimana penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari masalah diatas adalah : (1) Dalam pelaksanaannya restriksi kuantitatif dapat dilakukan dalam hal untuk mencegah terkurasnya produk-produk esensial di negara pengekspor, untuk melindungi pasar dalam negeri, untuk mengamankan berdasarkan *escape clause*, dan untuk melindungi neraca pembayaran luar negeri. Kebijakan nikel di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan daya saing jual nikel dalam negeri. Dan tuduhan Uni Eropa terhadap restriksi kuantitatif di Indonesia berbagai tindakannya tidak konsisten dengan perjanjian yang di bahas khususnya pada Pasal XI Angka 1 GATT 1994, (2) Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi sengketa nikel tersebut yaitu Indonesia sudah siap menghadapi gugatan-gugatan oleh Uni Eropa dan Indonesia juga sudah mempersiapkan berkas atau data untuk memicu Indonesia memenangkan sengketa tersebut, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ditempuh oleh kedua negara baru di tahap konsultasi.

Kata Kunci : Restriksi Kuantitatif, GATT, Sengketa Nikel, Indonesia, Uni Eropa, WTO